



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN**
3. NHK : **525073**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.018.750.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m²/150 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
2. Tanah Seluas 284 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 152.750.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 401.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **118.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS/ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK/REVO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **189.124.238****F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. **1.326.374.238**

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.326.374.238**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN KARANTINA PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRIYANTO
2. Jabatan : KEPALA BALAI BESAR UJI STANDAR KARANTINA PERTANIAN
3. NHK : 525073

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 871.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/150 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 466.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 115.000.000

1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS/ERTIGA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK/REVO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SE 88 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 444.426.510

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.430.426.510

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.430.426.510

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.